BAB II

DINAMIKA KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN

Laut China Selatan adalah suatu wilayah perairan yang memiliki luas sektor 3.500.000 km dan merupakan laut tepi dari Samudra Pasifik. Laut China Selatan merupakan wilayah yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini. Laut China Selatan menjadi wilayah dengan atraksi yang besar dan dinamis, karena pertumbuhan dan fluktasi ekonominya mempengaruhi perekonomian dunia karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Maka dari itu, muncul upaya konfrontatif yang melibatkan 4 negara Anggota ASEAN yaitu, Malaysia, Brunei Darussalam, Filiphina, dan Vietnam dengan China dan Taiwan yang mempersenketakan wilayah perairan ini, khususnya kepulaun Parcels dan Spratly agar dapat menguasai jalur perdagangan ekonomi yang akan membuat daya tawar dari negaranya meningkat.

Gambar 1. Wilayah yang di klaim oleh negara yang terlibat konflik

Sumber : google.com

Laut China Selatan memiliki wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan atau *Sea Line of Trade* (SLOT) dan jalur komunikasi Internasional atau *Sea Line of Communication* (SLOC). Klaim atas kepemilikan Laut China Selatan inilah yang menimbulkan konflik antar negara terjadi. Kawasan yang paling banyak diperebutkan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan adalah Kepulauan Paracel dan Spratly. Hal ini dikarenakan dua kepulauan ini memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah.

Sejarah konflik di Laut China Selatan dimulai pada tahun 1947, dimana China mengeluarkan klaim atas Kepulauan Spartly dan Paracel. Pada saat itu, China mengeluarkan sebuah peta yang memasukan Spartly, Paracels dan Pratas ke dalam wilayah teritorialnya. China juga mempertahankan keberadaan militer negaranya di wilayah tersebut. Hal ini memunculkan respon dari negara yang wilayah perbatasan nya bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, terutama negara-negara di anggota ASEAN. Bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan wilayah ini sangat strategis untuk dijaga keamanannya. Selain itu, ditambah pula dengan keadaan bahwa wilayah perairan Laut China Selatan merupakan perairan laut bebas.

A. Klaim Antar Negara

Negara-negara yang melakukan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan, khususnya kepulauan Paracels dan Spratly adalah China, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filiphina, dan Vietnam.

a) China

China beranggapan bahwa Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatan nya. China berpedoman pada latar belakang sejarah China Kuno tentang peta wilayah kedaulatan China. Menurut China, pulau-pulau dan wilayah Laut China Selatan ditemukan oleh pendahulu China yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi yang pada abad 12 sebelum Masehi oleh Dinasti Yuan pulau-pulau dan wilayah laut di Laut China Selatan di masukkan kedalam peta teritori China kemudian diperkuat

dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum Masehi. Pada awal ke-19 dan abad ke 20 China mengemukakan bahwa kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1.100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utaran kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari provinsi Hainan.[1]

Tahun 1947, China mengeluarkan sebuah peta yang merinci klaim dari kedaulatan negaranya. Didalam peta tersebut, China menunjukan bahwa kepulauan Paracel dan Spratly masuk kedalam wilayah negaranya. Tahun 1948, pemerintah China menarik garis klaim yang berbentuk huruf U untuk mempertegas semua wilayah yang ada di dalam garis tersebut adalah wilayah teritorial China, dan disebut dengan "Nine Doted Line". Tahun 1976, China menduduki kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 China kembali mempertegas klaim tersebut. Hal ini mendapat pertentangan dari Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filiphina dan Vietnam setelah pada 7 Mei 2009, pemerintah China mendaftarkan klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan kepada PBB.

[1] Kolonel Karmin Suharna, S. M. (2012). Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional. Hal.36.

Gambar 2. Wilayah yang di klaim China

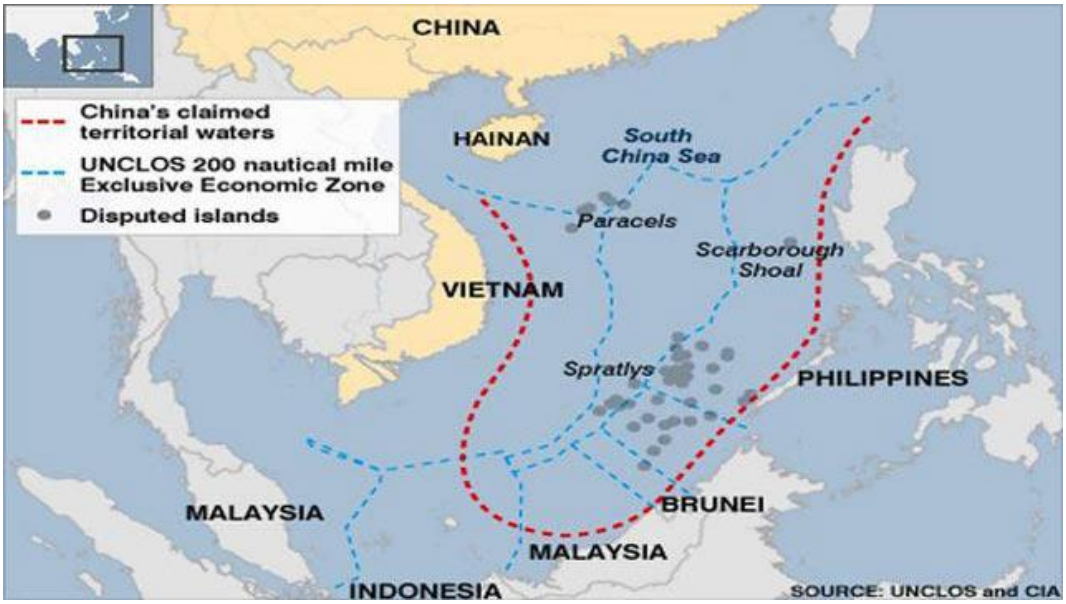

Sumber : google.com

b) Taiwan

Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutannya berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan pemilikan dan penggunaan wilayah itu oleh bangsa China sejak masa Dinasti Han (mulai sekitar 206 SM), disamping bukti-bukti dari kekuasaan Dinasti Sung (960-1279) dan Yuan (1282). Pemerintah China Nasionalis telah mengajukan tuntutannya atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang terletak didalam sembilan garis yang terputus dan yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Perancis dan menduduki Kepulauan Paracels dan Spratly pada tahun 1939. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Pemerintah China Nasionalis

mengambil alih kedua kepulauan itu dan menempatkan pasukan di Pulau Itu Aba tahun 1945.[2]

c) Malaysia

Tuntutan Malaysia baru dikemukakan pada tanggal 21 Desember 1979 pada waktu dipublikasikannya peta Landas Kontinen Malaysia. Malaysia menganggap pulau-pulau yang berada di Landas Kontinen dan ZEE-nya, yaitu : Terumbu layang-layang (Swallow Reef), Matanani (Mariveles Reef), dan Ubi (Dallas Reef) sebagai wilayah nya. Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah dan Serawak pada abad ke-18. Menurut sumber lain, di samping pulau-pulau ini, pulau-pulau dan karang karang Spratly lainnya yang tercantum di dalam peta tersebut adalah Commodore Reef, Amboyna Cat, Southwest Shoal, Ardasier Breakers, Gloubcester Breakers, Barque Canada Reef, Lizzie Weber Reef, Northeast Shoal, Glasgow Shoal dan North Viper Shoal.[3]

d) Brunei Darussalam

Meskipun belum menduduki satu pulau pun, seperti Malaysia, Brunei Darussalam mengklaim bahwa Louisa Reef adalah salah satu pulau karang yang masuk kedalam wilayah landas kontinen Zona Ekonomi Ekslusif negaranya hingga kedalaman 100 fathom. Brunei Darussalam menyatakan bahwa negara ini berpegang pada Konvensi UNCLOS 1982.

[2] Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Hal.6
[3] *Ibid.* Hal. 8

e) Filiphina

Negara bekas jajahan Spanyol ini mulai mengklaim Spratly pada tahun 1956 ketika seorang nelayan Filipina, Thomas Cloma, menemukan beberapa pulau di sekitar Filipina. Ia berinisiatif untuk melapor kepada pemerintah dan langsung ditanggapi positif. Pulau yang memiliki luas sekitar 65.000 mil laut persegi tersebut, diberi nama Freedom Land atau Pulau Kalayan dan mulai diduduki tahun 1971. Filipina menganggap Pulau Kalayan dan beberapa pulau di sekitarnya sebagai "Terra Nullius" atau wilayah yang tak dimiliki oleh siapapun. Presiden Filipina, Marcos pada tahun 1978 menandatangani sebuah dekrit yang berisi pengakuan atas gugusan kepulauan Kalayan. Pemerintah Filipina seharusnya hanya menggunakan 60 pulau yang terdiri dari pulau karang dan atol dengan luas sekitar 70.000 mil laut persegi. Saat ini Filipina menempatkan 1.000 pasukan marinir untuk menjaganya. Tahun 2012, sebuah kapal nelayan Cina beroperasi di sekitar gugusan karang Scar Borough, salah satu gugusan karang di kepulauan Spratly. Kontan saja Angkatan Laut Filipina berusaha menangkap kapal nelayan tersebut, namun penangkapan digagalkan oleh kapal pengintai Cina yang berada di perairan Spratly.[4]

f) Vietnam

Vietnam membantah klaim China dengan mengatakan bahwa telah menguasai kepulauan Paracels dan Spratly sejak abad ke-17. Vietnam juga

[4] Wirasuta, D. S. (2013). Keamanan Maritin Laut China Selatan : Tantangan dan Harapan. Hal. 85-86.

mengatakan bahwa Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan kepulauan Paracels dan Spratly.

Seperti hal nya China, Vietnam mengajukan tuntutan klaim atas kepemilikan kepulauan Spratly yang didasarkan pada latar belakang sejarah. Pada tahun 1930, kepulauan Spratly dan Paracel ada dibawah kontrol Perancis yang pada saat itu masih menjajah Vietnam. Dan pada saat Vietnam telah merdeka dari Perancis, negara ini mengklaim bahwa kepulauan Spratly adalah daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa.

Klaim Vietnam atas pulau-pulau Spratly juga berdasarkan perolehan Kaisar Gia Long tahun1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam tahun 1832. Kaisar Minh Mang yang memerintah kerajaan Vietnam pada tahun 1834 juga telah mendirikan pagoda dan tanda batu *(stone tablet)* di Pulau Spratly.[5]

Menurut Heinzig, dari sudut sejarah, tuntutan Vietnam lebih lemah daripada China karena negara ini mengalami kesulitan untuk membuktikan kesinambungan penguasaan mereka atas negara dan wilayah sejak tahun 211 SM akibat penjajahn China yang kemudian disambung dengan penjajahan Perancis setelah sempat merdeka dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tetapi Vietnam mengemukakan bahwa dokumen yang

[5] Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Hal. 6

menunjukan pemilikan Vietnam atas pulau-pulau Spratly telah dimusnahkan oleh China pada saat negara ini menjajah Vietnam.[6]

Setelah Perang Dunia II, Vietnam mengemukakan dasar tuntutanya dengan menunjuk pada Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951. Vietnam yang pada waktu itu hadir dan menandatangani perjanjian ini telah menegaskan tuntutannya atas Kepulauan Spratly seperti yang dinyataka oleh PM Republik Vietnam, Tran Van Huu bahwa "... kami menegaskan hak kami atas Kepulauan Spratly dan Paracel, yang selalu menjadi milik Vietnam ." Pada tahun 1956, Vietnam memasukan Kepulauan Spratly kedalam Provinsi Phuoc Tuy, dengan suatu dekrit tertanggal 22 Oktober 1956.[7]

Tabel 1

Klaim negara atas wilayah Laut China Selatan

Negara	**Laut China Selatan**	**Kepulauan Spratly**	**Kepulauan Paracel**	**Teluk Thailad**
Brunei Darussalam	UNCLOS	Tanpa Klaim Formal	Tidak	Tidak Mungkin
Kamboja	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	UNCLOS
China	Semua	Semua	Semua	Tidak Mungkin

[6] *Ibid*. Hal.6-7
[7] *Ibid.* Hal.7

Indonesia	UNCLOS	Tidak	Tidak	Tidak Mungkin
Malaysia	UNCLOS	3 Pulau	3 Pulau	UNCLOS
Filiphina	Sebagian Penting	8 Pulau	Tidak	Tidak Mungkin
Taiwan	Semua	Semua	Semua	Tidak Mungkin
Thailand	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	UNCLOS
Vietnam	Semua	Semua	Semua	UNCLOS

Sumber : Energy Information Administration, 2008. *Country Anaysis Brief:* South China Sea. Hal. 2

B. Kepentingan Claimant States

Bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, tentu sangat penting bagi mereka untuk menjadikan sebagian kawasan di Laut China Selatan sebagai wilayah teritorial negaranya. Tentu saja, hal ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh negara-negara tersebut. Diantaranya adalah kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan.

Bagi China, Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang sangat penting untuk menunjang program modernisasinya. Hal ini dikarenakan produksi minyak dari China semakin hari kian menurun. Padahal, kebutuhan China akan minyak semakin hari semakin meningkat. Tidak jelas berapa produksi penurunan minyak di China setiap tahun-nya, namun beberapa penelitian mengatakan bahwa diperkirakan kebutuhan energi, terutama minyak China akan melebihi jumlah produksinya. Maka dari itu, China semakin menguatkan tuntutannya terhadap Kepulauan Spratly yang diperkirakan mengandung sumber minyak yang berlimpah. Bagi China, perairan Laut China Selatan sangat penting sebagai jalur perdagangan dengan negara-negara ASEAN dan Asia timur lainnya, juga Amerika serikat dan sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara Guang Zho, Hongkong, Manila, dan Singapura.

Kepentingan politik China di Laut China Selatan dapat dilihat dalam konteks strateginya di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan dalam konteks Laut China Selatan secara spesifik. Dalam kaitannya dengan strategi politik luar negeri China di Asia Tenggara, Laut China Selatan kerap dianggap sebagai bagian dari wilayah dimana China diduga berniat untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Dalam hal ini, besar dugaan bahwa salah satu tujuan utama China di Asia Tenggara adalah menegaskan kembali arti penting dan peranan Beijing

sebagai sebuah negara besar, yang memiliki Angkatan Bersenjata dengan kemampuan memproyeksiakan kapabilitas Angkatan Laut ke laut lepas.[8]

Dilihat dari kepentingan keamanan, Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang sangat penting bagi China. *Pertama,* China mulai sadar akan kelemahan nya di masa lalu yang tidak fokus akan keamanan laut. Hal ini yang memudahkan imperialisme Barat yang kemudian mengakibatkan wilayah China terbagi-bagi dalam penguasaan kekuatan asing. China mempelajari banyak hal tentang arti penting penguasaan jalur laut di sekitar pantai bagi keamanan nasional negaranya. *Kedua*, kebutuhan China akan angkatan armada laut adalah sangat penting. Hal ini berkaitan dengan klaim China atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan dan ingin memperoleh status sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang handal. Maka dari itu, China semakin mengembangkan kekuatan angkatan lautnya.

Begitu pula Vietnam, perang berlarut-larut selama kurang lebih 30 tahun membuat Vietnam ingin mengembalikan lagi perekonomian negaranya yang sempat hancur. Maka dari itu, kawasan Laut China Selatan memiliki arti penting bagi Vietnam. Invasi Vietnam terhadap Kamboja membuat Vietnam terkena embargo ekonomi terutama oleh Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu, Laut China Selatan tidak memiliki arti yang begitu penting bagi kegiatan perdagangan Vietnam pada masa itu. Ketika konflik Vietnam dan Kamboja belum berakhir,

[8] Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Hal.34

negara ini menggantungkan kepentingan ekonominya kepada Uni Soviet. Pada tahun 1991, penyelesaian konflik Kamboja tercapai. Vietnam mendorong kerja samanya ekonomi nya dengan negara-negara ASEAN. Hubungan kerja sama ekonomi ini yang membuat Laut China Selatan menjadi penting bagi pembangunan ekonomi Vietnam. Perdagangan antara Vietnam dengan Amerika Serikat, negara-negara Asia timur, dan negara-negara lain nya seperti Jepang, China, Korea Selatan., dan Taiwan meningkat secara signifikan. Aktivitas perdagangan ini dilakukan dengan melewati jalur pelayaran Laut China Selatan. Meningkat nya aktivitas perdagangan Vietnam dengan negara-negara ini lah yang membuat jalur pelayaran Laut China Selatan memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi di Vietnam.

Kepentingan politik dan keamanan Vietnam di kawasan Laut China Selatan berubungan dengan kepentingan negara ini dengan Indochina dan Asia Tenggara. Kepentingan politik Vietnam yang paling utama adalah memelihara serta mempertahankan kemerdekaan, dan integritas wilayah yang dimilikinya. Kekhawatiran Vietnam akan ancaman China membuat Vietnam terus mempertahankan kepentingan nya dikawasan tersebut.

Menurut Vietnam, pendudukan nya atas Kepulauan Spratly yang diklaim sebagai wilayah teritorialnya menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan keamanan di wilayah ini sangat rawan jika dikuasai oleh negara-negara yang mengancam kedaulatan negaranya.

Filiphina, juga memiliki kepentingan ekonomi atas sumber minyak yang ada di kawasan lepas pantai di Laut China Selatan. Filiphina merupakan negara yang memiliki ketergantungan hingga 95% impor minyak. Dengan adanya penemuan sumber minyak baru di lepas Pantai Pelawan, ketergantungan Filiphina terhadap impor minyak akan berkurang menjadi 85%. Faktor inilah yang menyebabkan negara ini ingin menguasai kawasan Kepulauan Spratly yang memiliki cadangan minyak yang besar untuk mengurangi ketergantungan Filiphina terhadap impor minyak tersebut. Selain itu, perairan Laut China Selatan juga penting untuk perdagangan luar negeri Filiphina dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara besar lainnya.

Filiphina menganggap bahwa penguasaan terhadap Kepulauan Spratly (Kelompok Kalayaan) di kawasan Laut China Selatan adalah sangat penting. Hal ini terkait dengan kepentingan keamanan Filiphina yang erat kaitan nya dengan masa lalu yang pernah dialami oleh negara ini. Pada saat Perang Dunia ke II, kawasan Kepulauan Spratly dijadikan Jepang sebagai pangkalan untuk menyerang negara ini. Sehingga, untuk melindungi keamanan nya, Filiphina tidak akan membiarkan Kepulauan Spratly yang dikuasainya jatuh ke tangan negara lain.

Malaysia merupakan salah satu negara pantai yang menganggap bahwa perairan di Laut China Selatan merupakan kawasan yang mendukung kepentingan ekonominya. Hal ini dikarenakan Malaysia melakukan perdagangan luar negeri dengan banyak negara. Khususnya,

negara Filiphina, Jepang, China, Brunei Darussalam, Taiwan, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Kondisi geografis Laut China Selatan yang memisahkan Malaysia Barat dan Timur menyebabkan perairan ini penting bagi keamanan Malaysia. Malaysia harus merasa pasti bahwa perairan ini tidak akan digunakan untuk mengancam integritas wilayahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Malaysia merasa khawatir akan peningkatan dan aktivitas Angkatan Laut China di kawasan Laut China Selatan mengingat pandangan Malaysia yang menganggap China sebagai ancaman jangka panjang. Dibangunnya pangkalan Angkata Laut Malaysia di Labuan (Sarawak) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Malaysia di Laut China Selatan. Untuk maksud yang sama, Malaysia juga telah merencanakan akan membangun pangkalan Angkatan Laut di Sandakan (Sabah).[9]

Bagi Brunei Darussalam , perairan Laut China Selatan penting bagi perdagangan luar negerinya dengan Filiphina, dan negara-negara besar lainnya, ekspor Brunei Darussalam ke Filiphina mencapai US$33 juta, dan impornya dari Filiphina meliputi US$4 juta. Sementara itu ekspor Brunei Darussalam ke Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat mencapai US$1.178 juta, sedangkan impor Brunei Darussalam dari Jepang, Taiwan, dan China dan Amerika Serikat meliputi US$598 juta.[10]

[9] Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Hal. 38
[10] *Ibid.* Hal. 29

C. Konflik Antar Negara

Setelah ditemukannya berbagai sumber daya alam yang berlimpah di kawasan Laut China Selatan, konflik antar negara khususnya konflik maritim pun timbul di kawasan Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara, antara lain adalah : China dengan Vietnam, Vietnam dengan Indonesia, China dengan Filiphina, China dengan Malaysia, dan China dengan Brunei Darussalam.

a) China – Vietnam

Pada bulan Januari 1974 lebih dari 70 tentara Vietnam dan 18 tentara China tewas di Kepulauan Paracel. Dalam konflik ini, China menang dan menguasai kawasan yang dipersengketakan oleh kedua negara ini. China juga memasukan Kepulauan Paracel sebagai bagian dari kota administratif Sansha Provinsi Hainan.

Pada bulan Maret 1988, tentara Vietnam tewas sebanyak 60 orang dan China kembali memenangkan konflik dalam perebutan karang Jolusan (Kepulauan Spratly.

Pada bulan Mei 1992 terjadi baku tembak antara Cina dan Vietnam setelah Cina mengumumkan hukum perairan teritorial yang memasukkan seluruh wilayah Laut Cina selatan ke dalam wilayah Cina, serta pasca perusahaan minyak Cina (CNOOC) melakukan kerjasama eksplorasi minyak dengan Christone Energy (AS) di kawasan yang disengketakan. Hingga kini, sengketa Laut CinaSelatan belum menunjukkan titik terang. Cina tetap bertahan

berdasarkan alasan historis. Republik Rakyat Cina (Taiwan) juga mempunyai alasan yang sama.[11]

Vietnam merasa memiliki bukti kepemilikan yang sah atas Paracel dan Spratly sejak abad ke-17, pada masa kekuasaan Kaisar Gia Long (1802). Pada Oktober 1956, Vietnam memasukkan pulau Spratly bagian dari Provinsi Phuac Tay dengan menunjuk pada perdamaian San Francisco tahun 1951. Pada 21 Mei tahun 1977 Vietnam secara sepihak juga menetapkan batas perairan sejauh 12 mil dan wilayah ZEE sejauh 200 mil yang tumpang-tindih dengan negara lain.[12]

b) Vietnam – Indonesia

Vietnam sempat mengeluarkan klaim atas beberapa wilayah yang bersinggungan dengan kedaulatan Indonesia di Natuna. Namun konflik ini dapat diselesaikan dengan baik diantara kedua belah pihak.

c) China – Filiphina

Filipina mengklaim kepulauan Spratly berdasarkan UNCLOS 1982 yang menetapkan Zona Ekonomi Eklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut (321 km) dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial.Maka dangkalan Scarborough Shoal sebagai salah satu gugusan Spratly berjarak 160 km dari pulau terluar Filipina, sementara dari daratan Cina sejauh 800 km.[13]

[11] Wirasuta, D. S. (2013). Keamanan Maritin Laut China Selatan : Tantangan dan Harapan. Hal. 87
[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.* Hal.88

d) China – Malaysia

Sejak tanggal 21 Desember 1979, Malaysia memasukan Kepulauan Spratlu (Swallow Reef, Mariveles Reef, dan Dallas Reef) sebagai bagian dari wilayah Sabah. Malaysia mengeluarkan laim ini atas dasar alasan sejaran yang menunjukkan kekuasaan Inggris terhadap pulau-pulau tersebut yang sudah menjadi bagian wilayah Sabah dan Serawak sejak abad ke-18.

e) China – Brunei Darussalam

Brunei dengan alasan sejarah yang merujuk penguasaan Inggris terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly yang menjadi bagian Kesultanan Bruneisejak awal abad ke-18. Tumpang tindih klaim kedaulatan ini ditambah pula dengan perebutan sumber daya alam yang sangat besar yang menurut perkiraan menyimpan cadangan minyak dan gas terbesar ke empat di dunia. Geostrategis Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia tentunya menambah gairah penguasaan, karena dengan mengontrol kawasan ini akan membawa dampak ekonomi, politik bagi negara yang menguasainya sesuai dengan pernyataan Admiral Sir Walter Releigh : "Whose ever command the sea, command the trade whose ever command the trade of the world commands the world and consequently the world it self" (Sir Walter Raleigh, abad ke 17 tentang teori kekuatan laut).[14]

[14] *Ibid.*

f) China – Amerika

Pada tahun 2001 pesawat pengintai EP-3 AS mengalami tabrakan dengan pesawat tempur China F-8 di dekat pulau Heinan. Pada tahun 2009, terjadi insiden antara kapal China dan kapal-kapal AL AS Impecable dan Victorius yang dibayangi oleh 52 kapal perang PLAN *(People Liberation Army Navy)* dalam formasi tempur.

g) China – Jepang

Krisis kepulauan Senkaku atau Diaoxu berlangsung tahun 1894-1895, pada saat Dinasti Qing dari Cina berperang untuk merebut kekuasaan di Asia Timur melawan Dinasti Meiji dari Jepang. Perang yang dikenal dengan Jiawu ini alurnya dimenangkan oleh Jepang lewat perjanjian Shimonoseki. Inti dari perjanjian yang juga dikenal dengan sebutan perjanjian Maguan tersebut adalah pengakuan atas kekuasaan kekaisaran Jepang di Regional Asia Timur. Cina harus menyerahkan sebagian hakatas penguasaan tanah termasuk Taiwan yang terletak di Semenanjung Liadong. Di Semenanjung ini juga tempat Kepulauan Diaoxu atau yang disebut pulau Seinkaku oleh Jepang. Merasa pulau tersebut dalam teritori Liaodong, maka Jepang menganggap Kepulauan Diaoxu atau Senkaku juga dalam genggaman kekuasaannya.[15]

Kepulauan Diaoxu atau Seinkaku berada di sebelah Barat Okinawa. Kepulauan ini terdiri dari lima pulau besar dan tiga karang. Baik Jepang maupun Cina memiliki nama-nama tersendiri pada tiap pulaunya.

[15] *Ibid.* Hal. 89

Pulau-pulau besar adalah Diaoxu Dao atau Votsuri Jima, Chiwei Yu atau Taisho Jima, Chiwei Xu atau Kuba Jima, Be Xiaodao atau Kita jima, sementara karang-karangnya bernama Bei Yan atau Kuta Iwa, Nanyan atau Mina Miwa dan Fei Jiao Yan atau Tobise. Kisah historis ini berlanjut saat kekalahan telak Jepang di perang Dunia II tahun 1945.[16]

Dalam sebuah perundingan di Kairo tahun 1943, Jepang akhirnya mengembalikan Taiwan kedalam kekuasaan Cina. Tapi tidak demikian dengan kepulauan Diaoxu atau Senkaku. Jepang menganggap pulau tersebut masih dalam teritorialnya karena kekuasaan Jepang sebelumnya sudah mengubah status kepulauan Diaxou atau Senkaku (seputar Taiwan) menjadi bagian dari Okinawa. Dari jumlah babak baru konflik Jepang-Cina dimulai,menurut pemerintah Jepang, pada saat mereka menyerah kepada sekutu dan menyerahkan kekuasaan Taiwan kepada Tiongkok, pemerintah Cina tidak mau ambil pusing soal kepemilikan pulau tersebut. Namun ketika Cina menemukan adanya potensi minyak dan gas bumi di Diaxou atau Senkaku tahun 1970 mereka mempersalahkan hal ini sehingga membuat pihak Jepang gerah karena menganggap Cina sebelumnya tidak memiliki kontribusi apapun di kepulauan Diaxou atau Senkaku.[17]

Dari sisi pemerintah Cina, mereka menganggap Jepang telah melanggar kesepakatan Postdam. Perjanjian Postdam yang dibuat tahun

[16] *Ibid*
[17] *Ibid.* Hal. 89-90

1945 itu mengatur batas-batas kekuasaan wilayah Jepang dan Cina, karena kedaulatan Jepang dibatasi sampai kepulauan Honsu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil yang ditentukan oleh Negara sekutu. Pada tahun 1971 Cina telah melakukan protes atas hak kepemilikan pulau tersebut. Selama lebih 40 tahun, dua negara Asia Timur ini berselisih untuk menguasai Pulau Senkaku atau Diaoxu tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Malahan dalam tiga tahun terakhir, hubungan kedua negara makin tegang.[18]

Tabel 2

Insiden Bersenjata di Laut Cina Selatan sejak 1970-2002

Waktu	Negara	Aksi Militer
1974	China-Vietnam	China ambil alih Paracel dari Vietnam, dengan 18 tentara terbunuh dalam pertempuran sebuah pulau.
1988	China-Vietnam	Terjadi insiden antara angkatan laut China dan Vietnam di karang Johnson di Spratky, kapal Vietnma ditenggelamkan dan 70 nelayan tewas
1992	China-Vietnam	Vietnam menuduh China mendaratkan pasukan di karang Da Luc. China merampas hampir 20 kapal kargo Vietnam yang membawa barang dari Hongkong sejak bulan Juni sampai September.
1994	China-Vietnam	Terjadi Konfrontasi angkatan Laut antara China dan Vietnam dimana Vietnam secara

[18] *Ibid.* Hal. 90

		internasional mengakui perairan internasional atas eksplorasi minyak di perairan Tu Chinh blok 133.134 dan 135. Sementara China mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayah mereka. (Blok Wn'Bei-21)
1995	China-Filiphina	China menuduh Filiphina mencuri karang.Militer Filiphina menyerang orang-orang China pada bulan Maret dan menghancurkan simbol-simbol China.
1995	Taiwan-Vietnam	Pasukan altileri Taiwan menembaki kapal suplai Vietnam.
1996	China-Filiphina	Bulan Januari kapal China terlibt kontak senjata selama 90 menit dengan angkatan laut Filiphina dekat pulau Capone sebelah barat Luzon, Utara Manila.
1997	China-Filiphina	Bulan April, angkatan laut Filiphina perintahkan speedboat China dan dua kapal nelayan untuk meninggalkan laut dangkal Searborough. Kemudian Filiphina pindahkan patok-patok China di dan mengibarkan benderanya, China membalas dengan pengiriman tiga kapal perang untuk investigasi.
1998	Filiphina-Vietnam	Bulan Januari tentara Vietnam kontak senjata dengan perahu ikan Filiphina dekat karang pigeon.
1999	China-Filiphina	Bulan Mei perau nelayan China ditenggelamkan dengan ditabrak oleh kapal perang Filiphina, bulan Juli kapal China yang lain ditenggelamkan

1999	China-Filiphina	Kapal perang China dituduh melecehkan angkatan laut Filiphina dekat kepulauan Spratly.
1999	Filiphina-Vietnam	Bulan Oktober, sumber pertahanan Filiphina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filiphina mengintai di Spratly.
1999	Malaysia-Filiphina	Bulan Oktober, sumber pertahanan Filiphina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filiphina mengintai di Spratly.
2000	China-Filiphina	Bulan Mei, pasukan Filiphina adu tembak dengan nelayan 1 meninggal 7 ditahan.
2001	China-Filiphina	Selama 3 bulan pertama, angkatan laut Filiphina mengusir 14 kapal berbendera China dari Spratly.
2001	China-Filiphina	Filiphina mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal Scarborough untuk membatasi China meningkatkan struktur bebatuan.
2002	Filiphina-Vietnam	Bulan Agustus, pasukan Vietnam memberi tembakan peringatan pada militer Filiphina yang berpatroli di sekitar Spratly

Sumber : Energi Information Administration, 2008. *Country Anaysis Brief*: South China Sea. Hal.5-6